



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SWASEMBADA PANGAN SEBAGAI WUJUD KEMANDIRIAN PANGAN

Masyithah Aulia Adhiem

Analisis Legislatif Ahli Pertama

masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia merupakan jalan panjang yang perlu terus dikawal. Arah kebijakan pemerintah mulai menunjukkan beberapa sinyal positif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin bahwa hingga akhir tahun 2022 Indonesia akan tetap mengalami surplus stok pangan nasional, baik dari produksi lokal maupun impor. Tercatat komoditas yang mengalami surplus hingga Desember 2022, antara lain beras sebanyak 7,5 juta ton, jagung 2,8 juta ton, dan kedelai 250 ribu ton, dan ditambah komoditas pokok lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur, gula konsumsi, dan minyak goreng. Di samping itu, peningkatan nilai ekspor sektor pertanian tiga tahun terakhir dari Rp390,16 triliun pada 2019, menjadi Rp451,77 triliun pada 2020, dan Rp625,04 triliun pada 2021 menambah optimisme kita akan tercapainya ketahanan pangan. Namun, kondisi global yang sedang tidak menentu membutuhkan langkah khusus dari pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan nasional di tahun-tahun mendatang.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pasca-menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa swasembada beras yang telah dicapai harus dilanjutkan dengan komoditas-komoditas yang lain untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Ketahanan pangan yang merupakan cita-cita besar Indonesia perlu ditopang dengan kemandirian pangan yang memiliki penekanan pada kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri.

Beberapa komoditas pangan yang akan dipacu untuk segera mencapai swasembada, *pertama*, jagung yang ditargetkan mencapai swasembada pada tahun 2024. Ditandai dengan semakin berkurangnya impor jagung selama tiga tahun belakangan, hingga menyisakan impor jagung kualitas khusus untuk kebutuhan industri makanan dan minuman sebesar 800 ribu ton per tahun. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan program Satu Juta Hektar Pangan dan Pertanian sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis global yang terjadi. Jagung menjadi salah satu komoditas yang akan ditanam pada lahan seluas 650 ribu hektar dalam program tersebut, selain kedelai, ubi kayu, dan porang.

Kedua, kedelai sebagai komoditas lainnya yang menjadi indikator ketahanan pangan di Indonesia. Selain memperluas lahan produksi, pemerintah juga telah mengizinkan impor bibit rekayasa (*genetically modified organisms*) untuk kedelai sebagai upaya meningkatkan kualitas varietas unggul. *Ketiga*, sorgum yang diplot sebagai substitusi gandum. Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan akan impor gandum yang saat ini terkendala akibat adanya krisis global. Saat ini sorgum telah diujicobakan di beberapa provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Salah satu hasilnya di Waingapu, NTT, yang sangat menggembirakan sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan penanaman. *Keempat*, gula yang dicanangkan untuk swasembada dalam 4 tahun mendatang dengan upaya utama revitalisasi pabrik gula, perluasan lahan tebu,

dan peningkatan kemitraan dengan petani di tengah produktivitas gula tebu yang cenderung turun dan belum menyamai tingkat *output* 2012.

Kemandirian pangan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kebijakan pemerintah yang hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas semata, seperti penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian. Namun, juga diperlukan kebijakan pendukung seperti perlindungan terhadap sumber daya genetik (SDG) komoditas pangan lokal dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam sektor pangan nasional. Impor benih varietas unggul, seperti kedelai, dapat meningkatkan ancaman hama dan penyakit tumbuhan sehingga menyebabkan penurunan derajat ketahanan pangan sekaligus mengancam keanekaragaman SDG tanaman pangan lokal. Alternatif kebijakan peningkatan kualitas varietas unggul lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan SDG lokal sebagai bentuk pengembangan pertanian adaptif. Ini merupakan salah satu bentuk pengembangan bioprospeksi. Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan bioprospeksi dengan mengarahkan pada peningkatan kualitas bibit unggul lokal. Namun dalam mencapai kemandirian pangan, kesejahteraan petani harus diutamakan. Dalam hal ini Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah karena nilai tukar petani (NTP) pada subsektor pertanian masih di bawah 100 poin dengan kenaikan relatif rendah sebesar 0,97% secara *month-to-month*. Kemitraan yang inklusif dengan petani perlu dikembangkan, terutama pada program prioritas nasional, seperti *Food Estate* atau Satu Juta Hektar Pangan dan Pertanian.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2023 telah meminta jajaran Eselon I Kementan untuk berkomitmen sekaligus transparan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan/kemandirian pangan. Rencana kegiatan kementerian diharapkan selaras dengan target ketahanan/kemandirian pangan melalui swasembada beberapa komoditas pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden.

RKK Kementan tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian saja, tetapi juga perlu mendukung upaya peningkatan kualitas bibit unggul lokal dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan melalui riset dan pengembangan sumber daya genetik pertanian pangan. Pelibatan petani tradisional secara inklusif juga perlu mendapatkan perhatian lebih melalui berbagai program prioritas nasional subsektor pangan dengan mempertimbangkan peningkatan indeks NTP yang merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan petani.

Sumber

Bisnis Indonesia, 19 September 2022;
cnbcindonesia.com, 14 Agustus 2022 dan 19 September 2022;
dpr.go.id, 19 September 2022;
Kompas, 15 dan 19 September 2022; dan
Republika, 16 dan 17 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.